BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kelistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, pada saat beberapa perusahaan Belanda antara lain pabrik gula dan pabrik the mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Kelistrikan untuk kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGN yang semula bergera dibidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk kemanfaatan umum.

Pada tahun 1927 Pemerintah Belanda membentuk *s'Lands Waterkracht Bedrijven (LB)* yaitu perusahaan listrik negara yang mengelola beberapa PLT antara lain:

- PLTA Plengan
- PLTA Lamajan
- PLTA Bengkok Dago
- PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat
- PLTA Giringan di Madiun
- PLTA Tes di Bengkulu
- PLTA Tonsea Lama di Sulawesi Utara
- PLTA di Jakarta

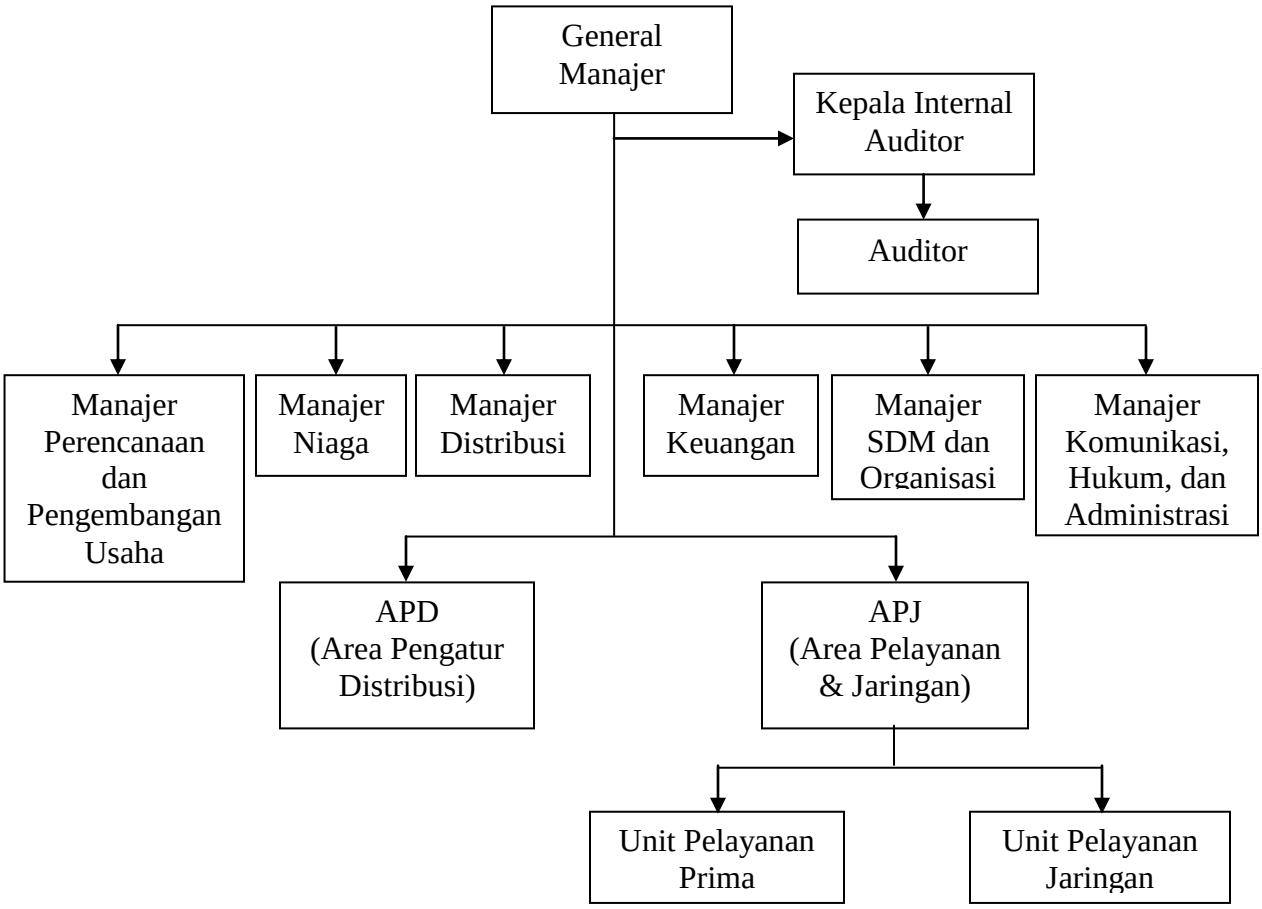
Penetapan secara resmi tanggal 27 Oktober 1945 sebagai Hari Listrik dan Gas berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Nomor 20 Tahun 1960. Namun kemudian berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga NOMOR 235/KPTS/1975 tanggal 30 September 1975 peringatan Hari Listrik dan Gas yang digabung dengan Hari Kebaktian Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang jatuh pada tanggal 3 Desember.

Mengingat pentingnya semangat dan nilai-nilai hari listrik maka, berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi, Nomor 1134.K/43/MPE/1992 tanggal 31 Agustus 1992 ditetapkan tanggal 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tugas pokok PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten ditetapkan berdasarkan Keputusan General Manager No.101.K/021/GM.DJBB/2004, pada tanggal 24 November 2004. Struktur organisasi PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten merupakan organisasi fungsional dan staff. Jenjang manajemen meliputi unsur pimpinan, pembantu pimpinan dan unsur pengawasan, yaitu Auditor Internal yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada pimpinan yang merupakan pejabat tinggi pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Secara garis besar stuktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten terdiri dari General Manager yang dibantu oleh beberapa Manager dan pengawasan secara internal,untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Intern PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dapat dilihat pada lampiran 4.

2.3 Deskripsi Jabatan

1. General Manager

a. Memimpin, mengurus, mengelola distribusi sesuai dengan maksud dan tujuan distribusi serta menyiapkan rencana kerja tahunan distribusi lengkap dengan anggaran keuangan secara tepat waktu.
b. Mewakili Distribusi di luar maupun di dalam pengendalian.
c. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan distributor serta menetapkan kebijaksanaan distribusi di bidang perencanaan, pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik dan sunber daya manusia.
d. Melaksanakan kebijakan umum dalam mengurus distribusi yang telah dibuat oleh Direksi.
e. Mengendalikan pelaksanaan tugas para Deputy Pimpinan kepala Kontrol Intern.
f. Mengelola dan Mengendalikan seluruh kegiatan berdasarkan kebijakan Ditereksi dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Mengadakan dan Memelihara tata buku dari administrasi distribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.
h. Menetapkan gaji/pensiunan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai serta mengatur hal kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemimpin Divisi

Terdiri dari beberapa Divisi Manager yang masing-masing memiliki deskripsi jabatan berbeda, yaitu:

a. Manager Perencanaan

1) Manager Perencanaan dan pengembangan usaha dibantu oleh Deputy Manager Perencanaan, Deputy Manager Pendanaan dan Jabatan Kepakaran di Bidang Pengembangan Usaha. Adapun deskripsi jabatannya, yaitu:
    a) Deputy Manager Perencanaan Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan perencanaan korporat (*Bussines Plan*) serta rancana kerja dan anggaran perusahaan dari Unit Bisnis Distribusi.
    b) Deputy Manager Pendanaan bertanggung jawab atas penyediaan sumber dana untuk mendukung rencana kegiatan investasi dan operasi.
    c) Jabatan Kepakaran di Bidang Pengembangan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan rencana pengembangan usaha/analisis usaha sesuai kaidah yang sehat.

b. Manager Niaga

Manager Niaga dibantu oleh Deputy Manajer Administrasi dan jabatan Kepakaran. Adapun deskripsi jabatannya, yaitu :

1) Deputy Manajer Administrasi niaga bertanggung jawab atas pencapain Deputy Manajer Administrasi niaga bertanggung jawab atas pencapaian kinerja niaga (ratio operasi, umur piutang, pendapata, penjualan dan susut tenaga listrik) dan pengaturan transaksi niagadari kontrak bisnis yang dilaksanakan di UPP, UPT / Cabang, AREA yaitu transaksi jual / beli / produksi.

c. Manajer Distribusi

Adapun tugas-tugas pokok dari manajer distribusi, yaitu :

1) Menyusun rencana pengembangan dalam sistem jaringan distribusi dan membina penerapannya.
    a) Menyusun strategi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi dan membina penerapannya.
    b) Menyusun SOP untuk penerapan dan pengujiann peralatan distribusi, serta SOP untuk operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi.
    c) Menyusun desain standar kontruksi jaringan distribusi dan peralatan kerja serta membina penerapannya.
    d) Mengevaluasi susut energi listrik dan gangguan pada sarana pendistribusian tenaga listrik serta sarana perbaikannya.
    e) Menyusun metode kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta membina penerapannya.
    f) Menyusun kebijakan manajeman jaringan distribusi dan kebijakan manajemen perbekalan distribusi serta membina penerapannya.
    g) Menyusun pengembangan sarana komunikasi dan otomatisasi operasi jaringan distribusi.
    h) Menyusun regulasi untuk penyempurnaan data induk jarinan (DIJ).
    i) Memantau dan mengevaluasi data induk jaringan.

d. Manager Keuangan

Manajer keuangan dibantu oleh Deputy Manajer Pengendalian Anggaran, Deputy Manajer Pengelolaan Keuangan, Depury Manajer Keuangan dan Jabatan Kepakaran dibidang analisis dan evaluasi sistem keuangan. Adapun deskripsi jabatannya, yaitu :

1) Deputy Manajer Pengendalian Anggaran bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan rencana aggaran perusahaan (RKAP) dan monitoring penggunaan dana.
2) Deputy Manajer Pengelolaan Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan dana arus kas secara akurat melaksanakan pengembangan sistem manajemen keuangan yang sehat serta pengelolaan keuangan yang menguntungkan serta menyiapkan dan untuk laporan keuangan.
3) Deputy Manajer Akuntansi bertanggung jawab menyiapkan informasi akuntansi yang akurat dan tepat waktu untuk semua pihak dan membantu manajemen dalam melaksanakan operasi perusahaan secara efisien dan efektif.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Di Indonesia penyelenggaraan fasilitas kelistrikan untuk umum dikelola oleh PLN mulai dari pembangkit sampai dengan *end user* menggunakan jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah, tegangan rendah, gardu-gardu induk dan penyediaan pembangkit sendiri (*Captive Power*) untuk kepentingan sendiri terutama di lokasi

yang belum terjangkau oleh jaringan PLN. Namun, kondisi ini mulai berubah beberapa tahun terakhir karena keterbatasan dana dan tuntutan pemenuhan terhadap masyarakat. Pemerintah mulai membuka peluang atau modal swasta untuk memasuki bisnis kelistrikan, kebijakan ini seiring dengan pola perkembangan global dunia.Bidang utama dari PT PLN (Persero) DJBB adalah:

1. Memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat. PT PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi, dan pengembangan pembangunan tenaga listrik.
2. Meningkatkan perolehan laba.

Selain aktivitas kerja tersebut, PT PLN (Persero) DJBB mempunyai tujuan yang tidak hanya mencari laba karena sebagai perusahaan milik negara yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, PLN bertugas untuk menyediakan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup memadai dan mutu yang sangat baik untuk dapat dimanfaatkan masyarakat luas. Dengan tidak menyimpang dari tujuan utama untuk dapat membangun ekonomi, ketahanan nasional serta meningkatkan derajat masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam bidang penguasaan tenaga listrik, sehingga PLN memiliki tiga sasaran yaitu:

1. Meningkatkan jumlah langganan;
2. Meningkatkan daya yang terpasang;
3. Meningkatkan penjualan KWH (tenaga listrik) kepada pelanggan.

PLN distribusi adalah satuan administrasi yang tidak memiliki fasilitas pembangkit dan transmisi. Unit ini membeli energinya dari unit PLN lainnya yang

diterima melalui Gardu Induk (GI). Seluruh pulau Jawa yang menyerap hampir 80% volume penjualan tenaga listrik seluruh Indonesia dikelola oleh empat PLN Distribusi yang berfunsi sebagai unit koordinatif. Salah satu unit distribusi tersebut adalah PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang memiliki wilayah kerja meliputi seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang.

Luas wilayah kerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten menjangaku lebih dari 42.196 km² yang meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten kecuali Tangerang. Wilayah dan beban kerja yang demikian besarnya dikelola oleh Unit-unit Pelaksana Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dan Area Pengatur Distribusi (APD), dengan komposisi sebagai berikut:

- Area Pelayanan Jaringan (APJ) : 16 unit
- Area Pengatur Distribusi (APD) : 1 unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) : 90 unit
- Unit Pelayanan dan Jaringan Prima (UPJ Prima) : 7 unit
- Kantor Pelayanan (KP) : 191 KP

Adapun unit-unit pelaksana tersebut adalah (APD Bandung) antara lain:

1. APJ Bandung
2. APJ Banten Utara
3. APJ Banten Selatan
4. APJ Bekasi

5. APJ Bogor
6. APJ Cianjur
7. APJ Cimahi
8. APJ Cirebon
9. APJ Depok
10. APJ Garut
11. APJ Karawang
12. APJ Majalaya
13. APJ Purwakarta
14. APJ Sukabumi
15. APJ Sumedang
16. APJ Tasikmalaya

Fungsi masing-masing cabang tersebut adalah untuk mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen, membangun jaringan distribusi, pelayanan langganan dengan sistem pembendaharaan serta melaporkan kegiatannya dengan membuat laporan realisasi dan pertanggungjawaban kepada pimpinan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.